



## **RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020**

### **I. PENDAHULUAN**

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 69 Ayat (1) dan Pasal 72. Berdasarkan hal tersebut maka Kami sampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 sebagai berikut :

#### **A. Kondisi Geografis Daerah**

Kabupaten Cirebon merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang terletak di bagian timur dan merupakan batas Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah, sekaligus sebagai pintu gerbang Provinsi Jawa Barat. Luas wilayah seluas 1.070,28 Km<sup>2</sup> (107.028 Ha) dan posisinya sangat strategis karena terlewati oleh jalur lintas Jakarta – Jawa.

##### **a. Letak Wilayah**

Kabupaten Cirebon terletak diantara 06° 30' Lintang Selatan sampai dengan 07° 00' Lintang Selatan dan diantara 108° 19'30" Bujur Timur sampai dengan 108° 50'03" Bujur Timur, dengan batas administrasi sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu dan Laut Jawa

Sebelah Selatan : Kabupaten Kuningan

Sebelah Barat : Kabupaten Majalengka

Sebelah Timur : Kota Cirebon dan Kabupaten Brebes (Prov. Jawa Tengah)

##### **b. Administrasi Pemerintahan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006, Kabupaten Cirebon terbagi menjadi 40 Kecamatan, 412 Desa dan 12 Kelurahan.

### **B. Gambaran Umum Demografis**

Kabupaten Cirebon pada 31 Desember 2020 berpenduduk 2.209.870 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 1.163.760 jiwa, penduduk perempuan 1.133.239 jiwa (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, 2021). Pada Tahun 2020, Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Sumber sebanyak 95.738 jiwa dan Kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Pasaleman sebanyak 27.621 jiwa.

## II. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Pencapaian kinerja indikator makro di Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

### A. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia

Peningkatan IPM Kabupaten Cirebon dari tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan yang tidak signifikan. Pada tahun 2019, capaian IPM Kabupaten Cirebon sebesar 68,69 dan pada tahun 2020 adalah sebesar 68,75.

### B. Angka Kemiskinan

Dari jumlah dan prosentase penduduk miskin Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan sebesar 1,3%. Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin adalah 217.664 jiwa atau 9,94%. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah dan *prosentase* penduduk miskin di Kabupaten Cirebon adalah 258.183 jiwa atau 11,24%.

### C. Angka Pengangguran

Pada Tahun 2019, TPT di Kabupaten Cirebon berdasarkan hasil Susesda diperoleh angka 10,28%. Sedangkan berdasarkan hitungan perkiraan, pada Tahun 2020 TPT Kabupaten Cirebon bertambah secara signifikan diangka 11,52%. Hal ini disebabkan banyaknya sektor usaha yang tutup akibat efek Pandemi *Covid-19* terhadap sektor dunia usaha.

### D. Pertumbuhan Ekonomi

Pada Tahun 2019 LPE Kabupaten Cirebon terhitung pada angka 4,86%, dan pada Tahun 2020 diperkirakan akan mengalami kembali perlambatan pertumbuhan dengan angka LPE -1,08%. Hal ini terjadi diakibatkan dari adanya Pandemi *Covid-19* yang memukul banyak sektor usaha sehingga laju pertumbuhan ekonomi menjadi negatif.

### E. Pendapatan Per Kapita

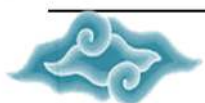
Pada Tahun 2019 diperoleh Pendapatan Perkapita ADHB untuk Kabupaten Cirebon sebesar 22,41 juta rupiah. Sedangkan pada Tahun 2020 diprediksi Pendapatan Perkapita ADHB akan berkisar sebesar 22,43 juta rupiah. Rendahnya kenaikan pendapatan per kapita pada Tahun 2020 didominasi oleh *multiple* efek dari pandemi *Covid-19*.

### F. Ketimpangan Pendapatan (*Ratio Gini*)

Pada Tahun 2019 didapatkan Indeks Gini Kabupaten Cirebon 0,344 artinya terjadi penurunan ketimpangan pendapatan sebesar 0,006. Karena Indeks gini Kabupaten Cirebon pada Tahun 2020 diperkirakan akan menjadi 0,338.

## III. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Pelayanan dasar yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Cirebon meliputi urusan 6 (enam) urusan yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sosial. Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang tercantum dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 Kabupaten Cirebon, berikut ialah capaian kinerja urusan pelayanan dasar dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Tahun 2020.



NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	CAPAIAN	KET
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	79,28%	
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	113,42%	
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	151,26%	
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	0,51%	
2	Kesehatan	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,11%	
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	91,67%	
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	98,24%	
		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	98,65%	
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	98,03%	
		6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	87,19%	
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	71,43%	
		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	14,60%	
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun kenatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	72,42%	
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	27,08%	
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	78,94%	
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	43,48%	
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	32,17%	
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	62,31%	
3	Pekerjaan Umum	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0,99%	
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0,00%	

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	CAPAIAN	KET
3	Pekerjaan Umum	3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	72,15%	
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	65,07%	
		5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	74,86%	
		6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100,00%	
		7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	83,32%	
		8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	20,00%	
		9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100,00%	
4	Perumahan Rakyat	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100,00%	
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program	100,00%	
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	5,91%	
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1,87%	
		5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	7,35%	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100,00%	
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	10,79%	
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100,00%	
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	4,51%	
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00%	
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	86,36%	
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 Menit	
6	Sosial	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	5,27%	
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	11,51%	

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	CAPAIAN	KET
7	Tenaga Kerja	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100,00%	
		2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	81,08%	
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	5,28%	
		4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100,00%	
		5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	31,44%	
8	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,00%	
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	0,01%	
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,66%	
9	Pangan	1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	152,07%	
10	Pertanahan	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100,00%	
		2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100,00%	
		3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	100,00%	
		4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100,00%	
		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	100,00%	
		6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100,00%	
11	Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/ Kota		
		2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	2,12%	
		3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab	59,06%	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Perekaman KTP Elektronik	108,18%	
		2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	28,92%	
		3	Kepemilikan akta kelahiran	106,90%	
		4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	27,40%	

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	CAPAIAN	KET
13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	500,00%	
		2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	250,00%	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,4	
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	75,90%	
		3	Persentase Kebutuhan ber - KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	13,301%	
16	Komunikasi dan Informatika	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100,00%	
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100,00%	
		3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	
17	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	46,90%	
		2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	100,00%	
18	Penanaman Modal	1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	-22,97%	
19	Kepemudaan dan Olahraga	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,01%	
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	4,12%	
		3	Peningkatan prestasi olahraga		
20	Statistik	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100,00%	
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100,00%	
21	Persandian	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	5640,00%	
22	Kebudayaan	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	100,00%	
23	Perpustakaan	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	50-75 (Cukup)	
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	665,569	
24	Kearsipan	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	41,13%	

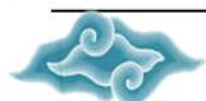
NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	CAPAIAN	KET
24	Kearsipan	2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepingin negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	50,00%	
25	Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	75292,27	
26	Pariwisata	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-54,61%	
		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kab/Kota	-65,94%	
		3	Tingkat hunian akomodasi	19,65%	
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	3,16%	
		5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	20.332.921.048,00	
27	Pertanian	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	636,21%	
		2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	-3,261	
28	Energi dan Sumber Daya mineral	1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	100%	
29	Perdagangan	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	
		2	Persentase kinerja realisasi pupuk	45,175%	
		3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang Berlaku	52,283%	
30	Perindustrian	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	1,15%	
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	60,00%	
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	78,57%	
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100,00%	
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kab/Kota	100,00%	

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	CAPAIAN	KET
30	Perindustrian	6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	35,00%	
31	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan Dan Keuangan)	1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	4,89%	
		2	Rasio PAD	0,126%	
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2	
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	81,043%	
		6	Opini Laporan Keuangan	WTP	
32	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0%	
		2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	7,08%	
		3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	17,87%	
33	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	194,77%	
		2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	8,97%	
		3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	8,97%	
34	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	10,61%	
		2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	4,35%	
		3	Assets Management	Ada	
		4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	7,17%	
35	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	103,37%	
		2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100,00%	

#### IV. HASIL EPPD DAN OPINI LAPORAN KEUANGAN DAERAH

##### A. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 5 Tahun terakhir didapatkan hasil sebagai berikut:





Uraian	Skor Kinerja Tingkat Nasional	Kategori Kinerja Tingkat Nasional	Peringkat Nasional
EPPD Tahun 2015 terhadap LPPD Tahun 2014	3,1275	Sangat Tinggi	64
EPPD Tahun 2016 terhadap LPPD Tahun 2015	3,1749	Sangat Tinggi	72
EPPD Tahun 2017 terhadap LPPD Tahun 2016	3,2945	Sangat Tinggi	53
EPPD Tahun 2018 terhadap LPPD Tahun 2017	2,6287	Tinggi	316
EPPD Tahun 2019 terhadap LPPD Tahun 2018	3,2618	Sangat Tinggi	N/A

## B. Opini Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil Audit atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon oleh Badan Pemeriksa Keuangan selama 5 Tahun terakhir didapatkan hasil opini sebagai berikut:

Uraian	Opini Laporan Keuangan Daerah
Opini BPK atas LKD Tahun 2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Opini BPK atas LKD Tahun 2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Opini BPK atas LKD Tahun 2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Opini BPK atas LKD Tahun 2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Opini BPK atas LKD Tahun 2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

## V. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN TAHUN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
<b>1.</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>3.858.761.615.658,00</b>	<b>3.770.704.066.601,01</b>	<b>97,72</b>
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>565.008.144.276,00</b>	<b>616.573.116.956,01</b>	<b>109,13</b>
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	200.000.000.000,00	223.610.292.769,00	111,81
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	30.688.002.650,00	31.122.706.929,00	101,42
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.633.523.000,00	9.312.545.336,00	96,67
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	324.686.618.626,00	352.527.571.922,01	108,57
<b>1.2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>2.088.479.031.592,00</b>	<b>2.021.914.842.243,00</b>	<b>96,81</b>
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	142.418.471.834,00	108.036.311.842,00	75,86
1.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.430.715.056.000,00	1.417.094.602.000,00	99,05
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	515.345.503.758,00	496.783.928.401,00	96,40
<b>1.3.</b>	<b>Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>1.205.274.439.790,00</b>	<b>1.132.216.107.402,00</b>	<b>93,94</b>
1.3.1.	Pendapatan Hibah	234.003.300.000,00	233.724.450.000,00	0,00
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya 2)	333.005.831.425,00	283.133.927.219,00	85,02
1.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	504.519.758.000,00	504.519.758.000,00	100,00
1.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	133.745.550.365,00	110.837.972.183,00	82,87
<b>2.</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>4.146.596.054.014,06</b>	<b>3.694.214.500.257,00</b>	<b>89,09</b>
<b>2.1.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>2.583.957.488.901,06</b>	<b>2.294.446.396.682,00</b>	<b>88,80</b>
2.1.1.	Belanja Pegawai	1.682.097.259.084,00	1.524.477.329.054,00	90,63
2.1.4.	Belanja Hibah	47.196.740.000,00	45.483.165.900,00	96,37
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	1.850.938.000,00	924.844.000,00	49,97
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	28.607.131.000,00	26.867.504.952,00	93,92

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan	642.996.561.000,00	642.707.232.956,00	99,96
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	181.208.859.817,06	53.986.319.820,00	29,79
<b>2.2.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.562.638.565.113,00</b>	<b>1.399.768.103.575,00</b>	<b>89,58</b>
2.2.1.	Belanja Pegawai	276.211.526.560,00	255.020.519.153,00	92,33
2.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	928.917.913.431,00	847.795.538.818,00	91,27
2.2.3.	Belanja Modal	357.509.125.122,00	296.952.045.604,00	83,06
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(287.834.438.356,06)</b>	<b>76.489.566.344,01</b>	<b>(26,57)</b>
<b>3.</b>	<b>Pembiayaan Daerah</b>	<b>287.834.438.356,06</b>	<b>288.834.438.356,06</b>	<b>100,35</b>
<b>3.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>288.834.438.356,06</b>	<b>288.834.438.356,06</b>	<b>100,00</b>
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	288.834.438.356,06	288.834.438.356,06	100,00
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	-	0,00
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	-	0,00
<b>3.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	-	0,00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	0,00	-	0,00
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>287.834.438.356,06</b>	<b>288.834.438.356,06</b>	<b>100,35</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)</b>	<b>0,00</b>	<b>365.324.004.700,07</b>	

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Cirebon TA. 2020 (Unaudited)

## VI. INOVASI DAERAH

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Kabupaten Cirebon selama Tahun 2020 telah melakukan berbagai inovasi dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Bahkan inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon telah berhasil memperoleh penghargaan dari Menteri Dalam Negeri berupa *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2020. Inovasi yang telah mendapatkan penghargaan tersebut ialah sebagai berikut.

NO.	JUDUL INOVASI	URAIAN INOVASI	IMPLEMENTASI
1	Sistem Sigap Cepat Eman Rakyat (SICERIA)	SICERIA adalah Sistem informasi rujukan yang beroperasi 24 jam dan menjadi jembatan komunikasi antar perujuk dengan penerima rujukan, serta dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada proses pelayanan kesehatan rujukan. Pada bulan Pengembangan sistem informasi rujukan ini menjadi Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) melalui PSC ( <i>Public Safety Center</i> ) SICERIA untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan kegawatdaruratan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak.	04/11/2015
2	Inovasi Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Online	Perizinan online mencakup: 1. Layanan perizinan <i>online</i> -Pengaduan <i>online</i> 2. Monitoring proses izin ( <i>online tracking system</i> ) 3. Tanda tangan elektronik tersertifikasi (BsrE-BSSN) 4. Survei IKM /SKM <i>Online</i> -Sms Gateway <a href="https://izinonline.cirebonkab.go.id/izin/">https://izinonline.cirebonkab.go.id/izin/</a>	02/07/2020

NO.	JUDUL INOVASI	URAIAN INOVASI	IMPLEMENTASI
3	Pendataan dan Pengukuran Tanah Aset Pemda yang Dimohon SKPD serta Updating Database Pertanahan	Tersedianya data pertanahan sebagai bahan acuan revisi RTRW dan penatagunaan tanah <a href="https://localhost/penatagunaan tanah/">https://localhost/penatagunaan tanah/</a>	01/01/2020
4	Sistem Informasi Peresepan Obat Elektronik	Pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan habis pakai berdasarkan resep perorangan yang disiapkan dalam unit dosis tunggal atau ganda, untuk penggunaan satu kali dosis/pasien secara elektronik.	03/09/2019
5	Sistem Informasi Rekonsiliasi Online (SIRAOS)	Merupakan aplikasi berbasis <i>web</i> yang dikembangkan dalam rangka menunjang proses rekonsiliasi data laporan keuangan SKPD dengan Subid Akuntansi dan Pelaporan <a href="http://103.212.211.230:81/siraos">http://103.212.211.230:81/siraos</a>	31/12/2019
6	Sistem Informasi Terpadu Kependudukan (SINTREN)	Merupakan aplikasi berbasis <i>web/internet</i> dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi data dan informasi untuk memroses pendaftaran administrasi kependudukan yang dilakukan secara elektronik ( <i>daring</i> ) <a href="https://disdukcapil.cirebonkab.go.id/sintren/login">https://disdukcapil.cirebonkab.go.id/sintren/login</a>	23/07/2020

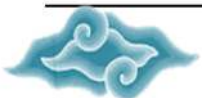
Selama Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah memperoleh berbagai prestasi dan penghargaan. Berikut merupakan prestasi dan penghargaan Tingkat Nasional yang telah diraih Pemerintah Kabupaten Cirebon.

1. Penghargaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dengan Status Kinerja Sangat Tinggi Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan Daerah Tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
3. *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2020 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
4. Penghargaan Peringkat Pertama Pelayanan Kenaikan Pangkat Tahun 2020 Kantor Regional III Award dari Badan Kepegawaian Nasional.
5. Juara 2 Pemuda Pelopor Nasional Bidang Inovasi dan Teknologi, atas nama Nana Sudiana, S.Kom, dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.
6. *Top Digital Implementation On 2020 On District Government Level Stars 4* pada ajang *TOP Digital Awards 2020*.
7. *Top Digital Transformation Readiness 2020* pada ajang *TOP Digital Awards 2020*.
8. *Top Leader Digital Implementation* pada ajang *TOP Digital Awards 2020*.
9. *Top IT Management Digital Implementation* pada ajang *TOP Digital Awards 2020*.

## VII. PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Cirebon Tahun 2020 telah selesai dilaksanakan dengan berbagai macam penyesuaian untuk menghadapi pandemi dan adaptasi kebiasaan baru. Mencermati penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengakselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon. Setidaknya, terdapat 5 (lima) hal yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Cirebon selanjutnya, yaitu:


1. Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) merupakan salah satu tantangan baru bagi Kabupaten Cirebon dalam menjalankan seluruh sendi kehidupan bermasyarakat. Seluruh penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Cirebon harus disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan keselamatan masyarakat di tengah Pandemi *Covid-19* yang masih belum berakhir. Penataan ulang program, kegiatan maupun target kinerja merupakan suatu keharusan untuk menyelaraskan dengan kondisi faktual dilapangan. Oleh karena itu perubahan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Cirebon merupakan hal awal dan mendasar yang perlu untuk segera dilakukan.
2. Standar Pelayanan Minimal merupakan kewajiban pemerintah disetiap tingkatan pemerintahan untuk memenuhi hak warga negara. Dengan dilakukannya *refocusing* anggaran tentunya akan mengubah target pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang telah direncanakan. Namun penerapan Standar Pelayanan Minimal tersebut tetap harus menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk dilaksanakan.
3. Pemulihan Ekonomi Nasional yang merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam menanggulangi lumpuhnya aktivitas masyarakat sebagai dampak Pandemi *Covid-19* harus pula menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Cirebon. Pemberdayaan masyarakat melalui usaha mikro dan kecil, pemberian bantuan sosial diharapkan dapat menjadi *trigger* untuk menggerakkan kembali roda perekonomian masyarakat. Dengan kembali pulihnya perekonomian masyarakat diharapkan gejolak maupun konflik sosial akibat dari tingginya angka kemiskinan, jumlah pengangguran maupun tingkat kriminalitas yang kita khawatirkan dapat diminimalisir.
4. Penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan sumber dana yang hendaknya lebih banyak dipenuhi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena kemampuan pendanaan dari Pemerintah Pusat sesungguhnya terbatas. Namun ditengah Pandemi *Covid-19* yang terjadi, sumber-sumber pendapatan Pemerintah Daerah semakin berkurang. Oleh karena itu, peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendekatan progresif, kreatif dan inovatif harus terus diupayakan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
5. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu tugas Pemerintah. Keberadaan *Standart Operating Procedure* dalam memberikan pelayanan publik merupakan suatu keharusan. SOP pelayanan publik saat ini harus



kembali disesuaikan dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan seluruh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Cirebon dituntut untuk melakukan perubahan pelayanan publik dari pelayanan manual menjadi pelayanan berbasis teknologi informasi merupakan suatu keharusan saat ini.

Berbagai upaya dan terobosan yang progresif, kreatif dan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan akan terus Kami lakukan secara maksimal ditengah Pandemi Covid-19 yang membutuhkan penanganan serius dari seluruh pihak. Selain hal tersebut, kerjasama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan seluruh stakeholders akan mendukung pencapaian kinerja dan ekspektasi masyarakat. Upaya-upaya tersebut akan selalu Kami prioritaskan untuk mengakselerasi pencapaian visi dan misi serta penyelesaian agenda pembangunan di Kabupaten Cirebon.

Demikianlah gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon sepanjang Tahun 2020. Beberapa capaian kinerja disadari masih belum sepenuhnya mencapai target kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan, baik pada tataran indikator makro maupun kinerja setiap urusan pemerintahan. Hal ini akan menjadi catatan dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya agar fungsi dan tugas pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Kabupaten Cirebon dapat terlaksana dengan lebih baik lagi.

  
**BUPATI CIREBON,**  
**Drs. H. IMRON, M.Ag.**